

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sosial dan lingkungan sekitarnya. Setiap perusahaan pada dasarnya memiliki tujuan utama yaitu memperoleh laba sebanyak-banyaknya sekaligus mensejahterakan para pemegang sahamnya. Kebanyakan perusahaan hanya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) tanpa memperhatikan sosial dan lingkungan sekitar yang berdampak langsung akibat dari aktivitas perusahaan. Namun ada di luar perusahaan ada yang harus mendapat perhatian yaitu masyarakat dan lingkungan, karena juga memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Jika perusahaan mengabaikan kesejahteraan sosial dan lingkungan, dalam hal ini mengabaikan pembangunan keberlanjutan maka akan berdampak pada keberlanjutan usaha itu sendiri.

Adapun beberapa kasus dampak sosial dan lingkungan yang telah terjadi di Indonesia diantaranya, Amelia (2017) salah satu perusahaan besar PMA Indonesia yakni PT Medco Energi International Tbk menjadi perusahaan minyak dan gas (migas) di dalam negeri yang paling banyak ditimpa kasus tumpahan minyak sepanjang 2016. Abdalla (2017) persoalan bekas tambang kapur PT Semen Gresik yang memakan korban. Lalu juga telah terjadi kerusakan hutan di Lampung yang mencapai enam puluh lima persen yang disebabkan oleh PT Delivra Sentosa (PMA atasnama PT Indomarine

Aquaculture Farm) yang diketahui belum memiliki AMDAL (Walhi, 2018). PT Freeport Indonesia dalam empat tahun terakhir sejak 2012 hingga 2016 hanya berkontribusi sebesar 0,4 persen dalam pendapatan Negara, nilai yang tidak sebanding dengan eskalasi kekerasan terhadap Rakyat Papua, penggusuran kampung dan penangkapan sewenang-wenang, serta penghancuran lingkungan hidup yang massif (Jatam, 2017). Maka timbul keinginan untuk meneliti alasan masih kurangnya kesadaran perusahaan akan dampak sosial dan lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas perusahaan.

Rangkaian peristiwa di atas membuktikan bahwa ada beberapa perusahaan yang memprioritaskan untuk mencari laba sebanyak banyaknya, dan masih belum sadar akan pentingnya memperhatikan dampak aktivitas perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial. Padahal Pemerintah telah membuat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat 1 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) saja melainkan harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Pengembangan berkelanjutan atau yang disebut dengan *sustainable development* dapat diartikan sebagai pengembangan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang namun tetap memperhatikan kebutuhan generasi mendatang. Perusahaan yang berupaya melakukan *sustainable development*

dapat memegang prinsip *Tripple-P Bottom Line* dari tanggung jawab sosial perusahaan yang meliputi tiga aspek, *people*-sosial; *planet*-lingkungan; dan *profit*-ekonomi pencapaian *sustainable development*. Karena *sustainable development* sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang harus dijalankan, agar perusahaan terus mendapat kepercayaan *stakeholder*.

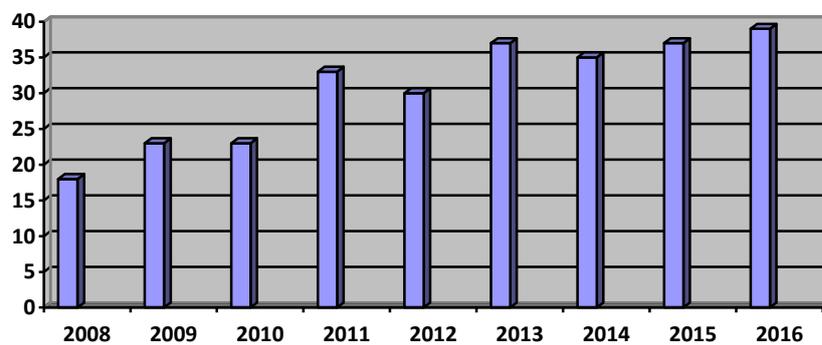
Penerapan *sustainable development* ini harus diimbangi dengan transparansi yang menjadi salah satu prinsip dari *corporate governance*. Bentuk transparansi ini dibuktikan dengan mengungkapkan *sustainability report*. Menurut *Global Reporting Initiative (GRI) sustainability report* adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan upaya organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Darwin (2014) *sustainability report* ini akan membawa manfaat bagi perusahaan untuk pengembangan investasi maupun untuk mendapatkan fasilitas pendanaan, selain itu melakukan kemitraan, dan sebagai alat ukur atas pencapaian target kerja dalam isu *Tripple-P Bottom Line*. Bagi investor, *sustainability report* berfungsi sebagai alat kontrol atas pencapaian kinerja perusahaan sekaligus sebagai media pertimbangan investor dalam mengalokasikan sumber daya finansialnya. Sementara bagi *stakeholder* lainnya, *sustainability report* menjadi tolak ukur untuk menilai kesungguhan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan (Adhima, 2013).

Dalam penyusunannya perusahaan dapat berpedoman dengan *Sustainability Reporting Guidelines (SRG)* yang dikeluarkan oleh GRI. GRI

merupakan pencetus *sustainability reporting* sejak tahun 1990, transformasi itu berasal dari misi GRI adalah untuk menghasilkan kerangka pelaporan yang kredibel, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua jenis organisasi. Sektor bisnis, tenaga kerja, akuntansi, investasi, dan nonpemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat meningkatkan transparansi kegiatan organisasi. Pedoman pelaporan keberlanjutan GRI secara berkala ditinjau dan diperbaharui agar dapat memberikan panduan yang terbaik agar menghasilkan pelaporan keberlanjutan yang efektif. Dalam penelitian ini akan membahas konteks pelaporan keberlanjutan GRI G4 pembaharuan. Masyarakat perlu mengetahui bahwa terdapat pembaharuan atas pedoman pelaporan keberlanjutan yang berkembang dalam hal konten yang berfokus pada ‘materialitas’ agar lebih ramah pengguna, lebih relevan, dan lebih kredibel. Sehingga dengan adanya pembaharuan ini diharapkan perusahaan dapat mengungkapkan informasi secara lebih baik kepada *stakeholder* mengenai keberlanjutan perusahaan (GRI G4).

Pengungkapan *sustainability report* di Indonesia masih belum banyak karena masih bersifat sukarela dan belum ada peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menerbitkan *sustainability report* (Pratama dan Yulianto, 2015). Padahal *sustainability report* tidak kalah pentingnya dengan *financial report* yang telah terlebih dahulu diwajibkan untuk diterbitkan bagi setiap perusahaan *go public* yang terdaftar di BEI. Dengan tuntutan bagi perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, akuntabel, serta praktik tata

kelola perusahaan yang semakin baik (*good corporate governance* atau GCG) mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela mengenai sebagai bentuk kontribusi nyata dalam bentuk aktivitas sosial dan lingkungan yang dilakukan disekitar kegiatan operasional perusahaan (Utama 2006 dalam Nasir *et.al*, 2014).



Gambar I.1

Jumlah Peserta *Indonesian Sustainability Report Award* (ISRA) 2008-2016

Sumber: sra.nscr-id.org

Upaya yang dilakukan *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR) sebagai organisasi pendukung *sustainability report* di Indonesia untuk meningkatkan pengungkapan *sustainability report* setiap tahunnya yaitu dengan menyelenggarakan *Indonesia Sustainability Report Awards* (ISRA). Berdasarkan gambar I.1 di atas menunjukkan jumlah peserta ISRA mengalami tren yang meningkat dari tahun ke tahun sepanjang 2008-2016. Artinya, semakin banyaknya perusahaan yang sadar akan pentingnya *sustainable development* melalui pengungkapan *sustainability report*. Walaupun angka ini masih jauh dari jumlah keseluruhan perusahaan *go public* yang mencapai kurang lebih 568 perusahaan (IDX, 2018). Diharapkan

dengan diadakannya ajang ini semakin banyak perusahaan yang sadar akan pentingnya melakukan pengungkapan lingkungan, sosial, dan ekonomi mereka dan manfaat atas pengungkapan yang mereka lakukan. Setiap pemenang yang meraih penghargaan akan mendapatkan citra yang baik dimata masyarakat dan *stakeholder* karena telah dinilai transparan, akuntabel, dan menerapkan GCG.

Penelitian mengenai *sustainability report* semakin berkembang. Namun terdapat beberapa kesenjangan pada beberapa literatur sebelumnya yang meneliti mengenai *sustainability report*. Awalia *et.al* (2015) yang menemukan adanya pengaruh aktivitas perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*, artinya ketika perusahaan memiliki aktivitas yang semakin tinggi, maka akan membuat perusahaan meningkatkan pengungkapan *sustainability report*. Sehingga akan membentuk opini publik bahwa perusahaan memiliki *image* yang positif dari masyarakat dengan begitu *sustainability* perusahaan akan terjaga. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasir *et.al* (2014) dan menemukan bahwa aktivitas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* didukung dengan Sari dan Marsono (2013) yang menunjukkan hasil penelitian yang sama.

Idah (2013) dan Mahmood (2018) menemukan adanya pengaruh dewan direksi terhadap *sustainability report*. Idah (2013) menyatakan semakin tinggi frekuensi rapat dewan direksi semakin tinggi peluang terwujudnya GCG. Sehingga perusahaan akan mengungkapkan informasi lebih, salah satunya

pengungkapan *sustainability report*. Penelitian tersebut kontras dengan penelitian Sari dan Marsono (2013), Awalia *et.al* (2015), dan Ningsyh (2015) yang menemukan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sari dan Marsono (2013), Aniktia (2015), dan Wang (2017) yang menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap *sustainability report*, hal ini menunjukkan komite audit mampu mendorong manajemen untuk melakukan praktik pengungkapan *sustainability report* sebagai media untuk mengkomunikasikan informasi kepada *stakeholder* dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan GCG melalui jumlah rapat yang dilakukan. Lain halnya dengan penelitian Idah (2013), Aziz (2014), Nasir *et.al* (2014), dan Pratama (2015) yang menemukan tidak adanya pengaruh komite audit terhadap *sustainability report*. Dikarenakan rapat-rapat yang dilakukan dinilai kurang efektif karena adanya dominasi suara anggota komite audit yang mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan.

Dari uraian di atas terdapat kesenjangan dari beberapa hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh aktivitas perusahaan, direksi, dan komite audit terhadap *sustainability reporting disclosure*.

Rasio aktivitas merupakan rasio yang dipergunakan sebagai ukuran dalam menilai tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Dari

rasio ini dapat terlihat apakah perusahaan lebih efisien atau tidak dalam mengelola aset yang dimilikinya (Kasmir 2011 dalam Nasir *et.al*, 2014).

Dalam mewujudkan GCG suatu perusahaan diperlukan pembentukan direksi yang berperan sebagai fungsi utama dalam manajemen untuk menetapkan tujuan stratejik perusahaan. Upaya yang dilakukan direksi untuk menjalankan fungsinya yaitu dengan melakukan rapat antar anggota direksi diharapkan GCG akan lebih mudah terwujud.

Sementara itu komite audit yang merupakan salah satu fungsi dalam GCG berperan membantu perusahaan dalam melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan perusahaan agar dapat mewujudkan prinsip-prinsip GCG, salah satunya prinsip transparansi dimana perusahaan dituntut untuk terbuka mengenai aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan. Semakin intens rapat komite audit dilakukan menunjukkan semakin sering para anggota komite audit bertukar pikiran untuk kepentingan *stakeholder* salah satunya keputusan mengenai pengungkapan sosial perusahaan (Aniktia, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memutuskan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Aktivitas Perusahaan, Direksi, dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan pada latar belakang, maka Peneliti dapat merumuskan permasalahan-permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah aktivitas perusahaan berpengaruh terhadap *sustainability reporting disclosure*?
2. Apakah direksi berpengaruh terhadap *sustainability reporting disclosure*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *sustainability reporting disclosure*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris perihal adanya hubungan antara:

1. Untuk mengetahui apakah aktivitas perusahaan berpengaruh terhadap *sustainability reporting disclosure*.
2. Untuk mengetahui apakah direksi berpengaruh terhadap *sustainability reporting disclosure*.
3. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap *sustainability reporting disclosure*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik sebagai kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis, baik bagi perusahaan, fakultas, dan bagi Peneliti sendiri. Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan pendukung dalam melakukan penelitian dengan topik serupa. Bagi Peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti secara lebih mendalam mengenai *sustainability reporting disclosure*.

2. Kegunaan Praktis

Bagi investor, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu investor untuk melakukan penilaian mengenai kinerja perusahaan terutama dalam hal tanggung jawab terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai salah satu bahan dalam mengambil keputusan investasi. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *sustainability reporting disclosure*.